

### BAB III

## AKTIVITAS POLITIK SJAHIRIR PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG SAMPAI AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA

### A. Biografi Sjahrir

Soetan Sjahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909. Ia adalah putra dari Moh. Rasad Gelar Maha Raja Soetan yang menjabat sebagai *Hoofd* atau jaksa pada *Landraad* di Medan. Ibunya, Poetri Siti Rabiah yang berasal dari Natal, daerah Tapanuli Selatan, ibunya berasal dari keluarga raja-raja lokal swapraja<sup>25</sup>. Sjahrir mengenyam sekolah dasar (*Eurapes Lagerere School*) dan sekolah menengah (MULO) terbaik di Medan, dan membetahkannya bergaul dengan berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda.<sup>26</sup> Malamnya dia mengamen di Hotel *de Boer*, hotel khusus untuk tamu-tamu kulit putih.<sup>27</sup>

Sjahrir menyelesaikan sekolah menengahnya di MULO pada tahun 1926, kemudian ia melanjutkan sekolah lanjutan atas di *Algemene Middlebare School* di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda saat itu.<sup>28</sup> Sjahrir sebagai seorang pelajar telah menunjukkan sifat kritisnya dengan lebih mengutamakan pengertian daripada sekedar menghapalkan pelajaran. Sifat-sifat ini terutama menonjol pada

---

<sup>25</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010).

<sup>26</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1996) 35.

<sup>27</sup> *Ibid*, 39.

<sup>28</sup> *Ibid*, 52.

mata pelajaran sejarah dan bahasa latin. Sjahrir tidak hanya mempelajari bahasa latin saja, tetapi mengajukan pertanyaan tentang filsafah dan sejarah Kerajaan Romawi. Perhatiannya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia timbul dengan adanya pemberontakan PKI dan sejarah perkembangan masyarakat, Negara dalam sejarah kemanusiaan.

Di kalangan siswa sekolah menengah *Algemeere Middlebare School* (AMS) Bandung, Sjahrir tidak hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Sjahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dengan mendirikan perguruan nasional "*Tjahja Volksuniversiteit*" di Bandung.<sup>29</sup> Selain itu Sjahrir menjadi seorang bintang di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis) sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil pentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan "*Tjahja Volksuniversiteit*", Cahaya Universitas Rakyat.<sup>30</sup>

Aksi sosial Sjahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada 20 Februari 1927, Sjahrir termasuk dalam sepuluh orang penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis, *Jong Indonesie*.<sup>31</sup> Perhimpunan itu kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres

---

<sup>29</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 67.

<sup>30</sup> Rosihan Anwar, *Mengenang Sjahrir* (Jakarta, Gramedia, 2010) xii.

<sup>31</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 64.

Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928.<sup>32</sup>

Di Bandung Sjahrir muda sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah himpunan pemuda nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di *Algemene Middlebare School* (AMS), Sjahrir kerap lari dikejar polisi karena bandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926, Koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah. Setelah tamat dari (AMS) tahun 1929 Sjahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Leiden di Amsterdam.<sup>33</sup>

Keberangkatannya ke Belanda saat itu adalah buah dari politik etis yang dikembangkan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Sebuah gagasan tentang pentingnya membalas budi pada Negara jajahan yang telah banyak menghasilkan kemakmuran untuk Belanda. Politik etis diusung oleh seorang tokoh liberal di parlemen Belanda bernama Conrad Theodor Van Deventer lewat sebuah tulisan yang diterbitkan dalam media berkala *De Gilds* berjudul “*Een Eeresschuld*” (hutang budi) pada tahun 1899.<sup>34</sup> Conrad terinspirasi karya Multatuli yang berjudul *Max Havelar*. Sebelum Van Deventer masih ada tokoh lain yang bernama Ir. Hendrikus Hubertus Van Kol yang pada tahun 1896 menyerukan *Geen roof meer ten bate van Nederland* (berhentilah merampok Hindia Belanda

---

<sup>32</sup> Hamdani, “Sutan Sjahrir di masa mudanya”, 73.

<sup>33</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 92.

<sup>34</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20* (Jakarta: Kanisius, 1988) 21.

untuk kepentingan Belanda). Gagasan-gagasan progresif muncul sebagai kritik atas kebijakan pemerintah kolonial Belanda selanjutnya menjadi bahasan dalam Majelis Rendah maupun Majelis Tinggi Belanda.<sup>35</sup>

Dampak dari kebijakan politik etis yang dikembangkannya adalah dimulainya suatu upaya balas budi terhadap rakyat jajahan yang dikenal dengan program irigasi atau pengairan, transmigrasi atau perpindahan penduduk dan edukasi atau pendidikan. Di bidang pendidikan mulai dibuka sekolah-sekolah pemerintah untuk kalangan pribumi walaupun masih dalam sifat terbatas seperti HIS, HBS, STOVIA, OSVIA, *Kweekschool*, *Hoofdenschool* merupakan manifestasi dari politik etis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negeri-negeri jajahan dan Soetan Sjahrir adalah salah satu orang pribumi yang merasakannya.<sup>36</sup>

Menurut saya tentunya sedikit banyaknya kebijakan memberikan pendidikan terhadap rakyat negeri jajahannya walaupun bukan maksud untuk tulus mencerdaskan kehidupan rakyat setidaknya memberikan celah bagi masuknya angin pembaharuan di Indonesia. Pendidikan yang diselenggarakan Belanda walaupun terbatas secara tidak langsung telah memunculkan suatu kesadaran politik baru bagi kalangan rakyat pribumi.

Pendidikan pada zaman kolonial disiapkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan menciptakan tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi-posisi *clerk* dan

---

<sup>35</sup> Hary Prabowo, *Perspektif Marxisme: Pergulatan Teori dan Praktis Menuju Republik* (Yogyakarta : Jendela Press, 2002) 5.

<sup>36</sup> *Ibid.*

administrasi rendahan serta tenaga kesehatan untuk penyakit-penyakit tropis. Tentunya hal ini untuk menggantikan orang-orang asing yang dipekerjakan dalam posisi tersebut. Dengan demikian biaya rendah akan menjadi keunggulan komparatifnya. Buta huruf menjadi melek huruf, hal ini merupakan perkembangan yang penting. Pemerintah kolonial berharap dengan melek huruf berbagai peraturan dan pengumuman dapat disampaikan dengan lebih mudah.<sup>37</sup>

## **B. Masa Pendidikan di Belanda**

Sjahrir berangkat ke negeri Belanda, setelah ia menamatkan sekolah lanjutannya di AMS Bandung. Di Amsterdam ada kakak Sjahrir, Sjahrizad, istri dokter Djoehana Wiradikarta yang sedang belajar memperdalam ilmu kedokteran, studi pasca sarjana. Sjahrir mondok bersama kakak dan iparnya. Ia belajar di fakultas hukum *Gemeente Universiteit van Amsterdam* (Universitas yang dikelola oleh kota praja Amsterdam) dan kemudian ia mendaftar di Universitas Leiden. Tapi Sjahrir jarang mengikuti kuliah, minat dan perhatiannya ada di tempat lain.<sup>38</sup>

Sjahrir mulai serius mempelajari sosialisme di negeri Belanda. Bahkan Sjahrir benar-benar mendalami sosialisme disana. Ia mulai bergabung dalam perkumpulan mahasiswa sosialis *Social Democratische Studeten Club*.<sup>39</sup> Secara sungguh-sungguh ia berkuat dengan teori-teori sosialisme tetapi ikut menenggelamkan dirinya dalam polemik-polemik tentang teori sosialisme. Ia

---

<sup>37</sup> Edi Cahyono, *Negara dan Pendidikan di Indonesia*, 2000, 5.

<sup>38</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan* (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010) 36.

<sup>39</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 96

terkena dampak semangat zaman atau *Zeitgeist* di Eropa pasca perang dunia pertama (1914-1918)<sup>40</sup>, yaitu Marxisme yang menimbulkan iklim perjuangan untuk memperbaiki nasib kaum buruh yang dieksploitasi oleh kaum kapitalis.

Sjahrir segera bersahabat dengan mahasiswa Salomon Tas, ketua klub mahasiswa sosial demokrat.<sup>41</sup> Untuk memperdalam pengetahuannya tentang sosialisme, Sjahrir mencari teman-teman ekstrim radikal, berkelana ke kiri, di kalangan kaum anarkis yang mengharapkan segala hal yang berbau kapitalisme. Ia pun bekerja pada sekretariat federasi buruh transportasi internasional.<sup>42</sup> Sjahrir merupakan pribadi yang cenderung *all out* tidak mau setengah-setengah.<sup>43</sup>

Di Belanda, ia bertemu dengan mahasiswa pribumi lainnya Mohammad Hatta yang menuntut pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi di kota Rotterdam, seorang putra minang itu seorang ketua organisasi mahasiswa yang didirikan tahun 1908 yaitu Perhimpunan Indonesia.<sup>44</sup> Kedua orang yang sama-sama merantau itu segera cocok satu sama lain. Sjahrir bergabung dan terpilih sebagai sekretaris Perhimpunan Indonesia, Februari 1930, Sjahrir waktu itu berusia 21 tahun.<sup>45</sup>

Namun Perhimpunan Indonesia dipengaruhi oleh anggota-anggota yang pro komunisme atau yang berfaham komunis, antara lain Roestam Effendi,

---

<sup>40</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati*, 37.

<sup>41</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 96.

<sup>42</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir, Negrawan Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului Zamannya* (Jakarta : Kompas, 2011) 15.

<sup>43</sup> *Ibid*, 37

<sup>44</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 109.

<sup>45</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati*, 37.

seorang guru HIS di Padang sebelum berangkat ke Belanda. Dia adalah orang Indonesia pertama yang menjadi anggota parlemen Belanda, *Tweede Kamer*, yang mewakili Partai Komunis Belanda.<sup>46</sup> Seorang anggota PI lainnya yang pro komunis adalah Raden Mas Abdul Madjid, putra seorang *Regent* (bupati) di Jawa yang menjadi ketua baru Perhimpunan Indonesia.<sup>47</sup> Hatta dan Sjahrir yang berfaham sosialisme kemudian disingkirkan dari pimpinan PI oleh kaum komunis itu.<sup>48</sup>

Pemberitaan di tanah air sedang tidak bagus, pergerakan kebangsaan dihantam oleh pemerintah Hindia Belanda. Ir. Soekarno ditangkap dan dipenjarakan pada akhir Desember 1929.<sup>49</sup> Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Soekarno kemudian dibubarkan. Mr. Raden Mas Sartono mantan tokoh Perhimpunan Indonesia mendirikan partai baru yaitu Partindo.<sup>50</sup> Hatta dan Sjahrir yang mendengar hal ini kemudian tidak setuju dengan langkah-langkah tersebut, yang mereka anggap sebagai kemunduran dalam pergerakan rakyat ke arah Indonesia merdeka.<sup>51</sup>

Kader-kader dari golongan merdeka yang menentang pembubaran PNI kemudian berkumpul dalam wadah baru yang dinamakan Pendidikan Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI-pendidikan atau PNI-Baru. Hatta dan Sjahrir

---

<sup>46</sup> Roestam Effendi, *Menyusuri kenang-kenangan Perjuangan Masa Muda*, dalam *Bunga Rampai Sumpah Pemuda* (Jakarta : Balai Pustaka 1986) 399-400.

<sup>47</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir, Negrawan Humanis*, 16.

<sup>48</sup> J.D Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan : Peranan Kelompok Sjahrir*, (Jakarta : Grafiti 1993) 42.

<sup>49</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 118.

<sup>50</sup> *Ibid*, 121.

<sup>51</sup> J.D Legge, *Kaum Intelektual*, 58.

berpendapat mereka harus kembali ke tanah air untuk membantu PNI-pendidikan dan membantu perjuangan melawan kolonial Belanda. Karena Hatta belum selesai studinya maka mereka sepakat mengambil keputusan bahwa untuk sementara Sjahrir yang meninggalkan kampus untuk kembali ke tanah air sampai Hatta selesai, kemudian Hatta pulang dan Sjahrir bisa kembali ke Belanda untuk menyelesaikan kuliahnya. Namun sayang rencana Sjahrir untuk kembali ke kampus tidak pernah terlaksana, karena ia ditangkap Belanda sebelum berangkat kembali ke Belanda.<sup>52</sup>

### **C. Gerakan Politik Sjahrir Masa Penjajahan Belanda**

Dengan pendidikan tinggi yang dimilikinya, disertai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam mengenai perkembangan di dunia internasional umumnya dan Indonesia khususnya, menjadikan dirinya mampu memainkan peranan penting di bidang politik dan diplomasi dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan politik dan diplomasi adalah sebagai manifestasi dari pemikirannya. Pengalaman yang ditempa sejak penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang di Indonesia memberikan semangat perjuangan yang cukup militan hingga masa revolusi.

Selama studi di luar negeri, Sjahrir tidak pernah melewatkan semua hal yang berkaitan dengan bangsanya. Ia selalu memperhatikan sekaligus merasa prihatin akan kondisi bangsanya saat itu. Ia mendengar berbagai berita mengenai kejadian politik yang menimpa perjuangan pergerakan rekan seperjuangannya,

---

<sup>52</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir : Demokrat Sejati*, 38.

menjadikan dirinya segera kembali ke Indonesia pada tahun 1932. Sementara itu partai nasional Indonesia (PNI) pimpinan Sukarno mengalami kemunduran, dan bahkan bubar karena Sukarno dan rekan seperjuangannya ditangkap Pemerintah Belanda dan diasingkan ke Digul.<sup>53</sup>

Dengan dibubarkannya PNI pimpinan Sukarno oleh Belanda, menimbulkan perdebatan dalam kalangan elite politik Indonesia. Munculnya golongan yang pro dan kontra akan pembubaran PNI sehingga lahirlah dua partai baru, yakni Partindo (Parti Indonesia) pimpinan Sartono dan PNI Baru pimpinan Hatta dan Sjahrir.<sup>54</sup>

Partindo dan PNI Baru memiliki tujuan yang sama, yakni Indonesia merdeka. Asas politiknya juga sama, ialah *self help* atau menkooperasi.<sup>55</sup> Partindo mengalami nasib yang sama dengan PNI lama. Gerak dan aktivitasnya dibatasi oleh Belanda, sehingga pada tahun 1932 Partindo dibubarkan, kini hanya tinggal PNI-Baru.<sup>56</sup>

Dalam perkembangan lebih lanjut Sjahrir tampil sebagai ketua PNI Baru yang mengantarnya menjadi partai politik besar dan radikal waktu itu.<sup>57</sup> Dalam usianya yang relatif muda, ia bersikap hati-hati dan waspada karena akan menerima kekalahan dari kolonial Belanda. Apabila belum kuat memukul mundur atau setidaknya mempertahankannya. Sjahrir menilai bahwa

---

<sup>53</sup> J.D Legge, *Kaum Intelektual*, 58.

<sup>54</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 145

<sup>55</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional, Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan, Jilid II* (Yogyakarta : LKiS 2008) 191.

<sup>56</sup> *Ibid*, 226.

<sup>57</sup> Leon Salim, *Bung Sjahrir Pahlawan Nasional* (Medan : Masa Depan,1966) 14.

pergerakan nasional banyak didasarkan pada massa aksi. Para pemimpin membakar semangat massa dan mengadakan egitasi-egitasi yang hebat. Hal ini menjadi pemikiran dan persoalan bagi dirinya, mengingat massa pada saat itu kurang mendapat kesadaran politik kerakayatan serta isi dari pergerakan itu sendiri.

Pada masa penjajahan kolonial Belanda ini Sjahrir berusaha mengembangkan sikap kemandirian di kalangan massa. Ia merasa perlu membentuk manusia-manusia politik yang berfikiran merdeka. Pemikiran dan perjuangan yang hendak dilaksanakan adalah politik non-kooperasi dengan konsekuensi anti kapitalis dan imperialis. Hal tersebut telah direalisasikan dalam PNI-Baru, yang dipimpinnya. Ia telah membekali massa dan anggotanya dengan kesadaran, menumbuhkan keberanian dan semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sjahrir bersama PNI Barunya giat dalam mengadakan berbagai aksi atau propaganda, antara lain dengan membicarakan riwayat Belanda, kedudukan tanah jajahan dengan segala penderitaan rakyatnya, serta Kemungkinan-kemungkinan mengakhiri masa pemjajahan. Dalam melaksanakan aksinya, PNI Baru memasuki desa-desa. Tetapi kurang begitu beruntung, aksi tersebut diketahui pemerintah, dan dirasakan bahwa aksi tersebut membahayakan pihak Belanda. Maka diambil tindakan oleh pemerintah Belanda, antara lain: (1). Polisi diperintahkan bertindak lebih keras dalam mengawasi rapat-rapat, (2).

Larangan pegawai negeri menjadi anggota partai (Juni 1933), (3). Larangan mengadakan sidang nasional.<sup>58</sup>

Sangat singkat sekali, Sjahrir mendapat kesempatan bergerak dan berjuang pada masa kolonial Belanda hanya dua tahun, sebab ia dianggap membahayakan ketentraman umum, sehingga pada tahun 1934 ditangkap oleh pemerintah Belanda, ditahan di Jakarta. Pada tanggal 27 Januari 1935 dibuang di Digul bersama Hatta.<sup>59</sup> Pada tanggal 30 Januari 1936 dipindahkan ke Banda Neira.<sup>60</sup> Sementara itu di tempat pengasingan Sjahrir terdapat para elite politik Indonesia, antara lain Dr. Cipto Mangun Kusumo dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri.<sup>61</sup>

Sesudah penangkapan para pemimpin politik, maka kegiatan politik dilarang dan hanya organisasi-organisasi yang mau bekerjasama diperkenankan secara resmi untuk tetap hidup, diantaranya:

1. Parindra (Partai Indonesia Raya), yang terbentuk pada tahun 1935 melalui penggabungan Boedi Oetomo dengan organisasi-organisasi lain, bersedia duduk dalam Volksraad dan menghindari tentangan yang radikal terhadap pemerintah. Tetapi dengan mengumpulnya awan peperangan di Eropa lingkungan nasionalis berubah. Orang-orang radikal yang selamat, terutama yang lebih cenderung pada

---

<sup>58</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20*, 53.

<sup>59</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 227.

<sup>60</sup> *Ibid*, 269.

<sup>61</sup> Hatta, *Indonesian Patriot*, 186.

marxis, mulai berpandangan bahwa masalah utama yang akan dihadapi di masa depan yang dekat bukanlah perjuangan kemerdekaan melainkan bahaya fasisme. Dalam keadaan ini para pemimpin politik untuk sementara waktu bersedia bekerjasama dengan rezim kolonial.<sup>62</sup>

2. Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) pada 1937. Dalam kondisi di akhir dasawarsa 1930 ini, Gerindo menyerukan kerjasama dengan Belanda. Hal ini bukan merupakan masalah kemanfaatan masalah cara untuk selamat dalam lingkungan yang represif melainkan benar-benar soal prinsip. Menurut analisis Gerindo diktator-diktator di Eropa berkaitan dengan fanatisme militer di Jepang, dan merupakan hasil wajar dari evolusi kapitalisme. Oleh karena itu telah mengancam demokrasi seluruh dunia dan dalam situasi krisis global perlawanan terhadap fasisme adalah lebih penting daripada perlawanan terhadap kejahatan pemerintah kolonial. Bahkan, kesudahan perjuangan kemerdekaan di Indonesia dan di negara-negara lain, pada tingkat terakhir akan bergantung kepada kekalahan fasisme. Mengingat kemungkinan parahnya perang di Eropa, dan barangkali, juga di Pasifik, Gerindo berpendapat bahwa untuk sementara waktu kaum nasionalis Indonesia harus memihak Belanda.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> J.D Legge, *Kaum Intelektual*, 63.

<sup>63</sup> J.D Legge, *Kaum Intelektual*, 64.

Dalam tahun 1939 kelompok- kelompok nasionalis utama bersatu dalam sebuah organisasi federasi baru yakni Gapi (Gabungan Politik Indonesia) yang mencakup Gerindo, PSII, Perindra, Persatuan Partai Katolik, dan organisasi-organisasi kedaerahan seperti Pasundan (Jawa Barat) serta persatuan Minahasa.<sup>64</sup>

Garis-garis besar pemikiran Gerindo juga dianut oleh Sjahrir yang masih berada dalam pengasingan di Banda Neira. Sementara perang saudara di Spanyol merupakan satu langkah lain dalam gerak maju kemenangan fasisme di seluruh dunia, di Asia, invasi Jepang ke Cina merupakan bagi dari pola yang sama. Menurut Sjahrir negara-negara Axis (Poros Jerman – Italia – Jepang) merupakan ancaman yang lebih besar bagi kemerdekaan Indonesia dibandingkan dengan kolonialisme Belanda pada waktu itu.<sup>65</sup>

Dengan demikian Gerindo menyediakan tempat bernaung bagi orang-orang radikal yang lolos dari tindakan pembuangan dan tak mungkin lagi mempunyai organisasi radikal tersendiri. Namun kehidupan Gerindo sangat mengandalkan izin, dan orang masih dapat menyatakan bahwa penangkapan-penangkapan yang dilakukan pada tahun 1933 dan 1934 telah membendung dan membatasi pertumbuhan satu generasi aktivitas secara keseluruhan<sup>66</sup>, yang jelas kebijakan represif pemerintah Hindia merupakan pukulan bagi perkembangan pendidikan nasional Indonesia. Walaupun para anggota lama masih dapat memelihara hubungan satu sama lain, PNI tidak mungkin lagi aktif berkampanye

---

<sup>64</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20*, 61.

<sup>65</sup> Sutan Sjahrir, *Renungan dan Perjuangan* (Jakarta : Djambatan 1990) 236.

<sup>66</sup> J.D Legge, *Kaum Intelektual* 63.

atau merekrut anggota baru. Dengan meletusnya Perang Dunia II, orang-orang huangan politik di Boven Digul dipindahkan ke Australia.<sup>67</sup> Dengan demikian tetap terpisah dari kancah politik setempat sampai menyerahnya Jepang dan meletusnya revolusi. Hatta dan Sjahrir, yang telah dipindahkan dari Digul ke Banda Neira pada tahun 1936, dapat kembali ke Batavia pada awal tahun 1942 dan akhirnya keluar dari tahanan setelah pemerintah Jepang menduduki Indonesia.<sup>68</sup>

#### **D. Masa Pendudukan Jepang**

Masuknya tentara Jepang ke Indonesia pada bulan-bulan pertama, kedua dan ketiga tahun 1942 kelihatannya mendapat sambutan yang baik dari penduduk Indonesia. Tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno dan Hatta bersedia melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah pendudukan Jepang, padahal sebelumnya pada masa pemerintah Hindia Belanda mereka bersikap nonkooperatif. Faktor-faktor yang menyebabkan kesediaan mereka bekerja sama itu adalah pertama, kebangkitan bangsa-bangsa timur. faktor lainnya adalah tentang ramalan Joyoboyo yang hidup dalam masyarakat tradisional. Dalam ramalannya bahwa akan datang orang-orang kate yang akan menguasai Indonesia selama seumur jagung dan sesudah itu kemerdekaan akan tercapai. Faktor lainnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 65.

<sup>68</sup> Sutan Sjahrir, *Renungan dan Perjuangan*, 247.

<sup>69</sup> Poesponegoro, Marwati Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia*, cetakan, ke-2 (edisi pemutakhiran), (Jakarta, Balai Pustaka, 2008) 27.

Pada saat Jepang datang dan berhasil menduduki Indonesia, Sjahrir berada dalam status tahanan. Pada tahun 1942 pemerintah Jepang mengeluarkannya dari penjara, tetapi tidak begitu saja memberikan simpati kepada Jepang karena ketajaman analisisnya, maka Sjahrir memandang kehadiran Jepang bermaksud tidak baik. Pada masa awal kedatangan Jepang telah berhasil menarik simpati terutama di kalangan kaum terpelajar, namun Sjahrir sebagai seorang rasionalitas memandang segala kemungkinan yang akan terjadi. Sjahrir memandang Jepang sebagai fasisme di Asia, padahal selama pergerakan nasional dengan gigih mencanangkan perjuangan dengan paham sosialis kerakyatan. Oleh karena itu ia merasa bahwa fasisme Jepang harus ditentang karena berlawanan dengan prinsip sosial kerakyatan.<sup>70</sup>

Sebagai usaha menentang Jepang, Sjahrir segera menghubungi Sukarno-Hatta untuk mengadakan perundingan untuk menyusuri strategi perjuangan. Pada bulan April 1942, ketiga tokoh tersebut mengadakan perundingan dan berhasil memutuskan strategi yang harus ditempuh. Adapun strategi yang pertama adalah secara legal, di mana Sukarno – Hatta bersama tokoh yang lebih tua bergerak dan berjuang secara kooperasi dengan pihak Jepang. Strategi perjuangan yang kedua adalah secara illegal, di mana Sjahrir tidak menghendaki adanya kerja sama dengan Jepang atau non kooperatif.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Taufik Abdullah, *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta : LP3ES 1994) 87

<sup>71</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20*, 80.

Sementara itu Sukarno – Hatta cenderung untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini disebabkan karena kondisi Indonesia yang mendesak dan menuntutnya bersikap demikian. Tetapi walaupun demikian mereka tetap memiliki tujuan Indonesia merdeka. Sementara itu Sjahrir sebagai pemimpin pergerakan, ia cenderung non-kooperatif. Dalam hal ini Sjahrir menolak untuk bekerjasama dengan Jepang dengan berbagai alasan. Ia menandakan bahwa berhubungan dengan perubahan situasi dunia, ia meninjau kembali haluan gerakan rakyat. Dengan cara bekerjasama dengan gerakan nasional dan pemerintah Belanda atas dasar saling mengerti akan bahaya dari luar yang mengancam kedua bangsa.<sup>72</sup> Walaupun perbedaan asas dalam perjuangan, tetapi hubungan antara Sjahrir dan Hatta terjalin baik. Sjahrir dan Hatta memakai strategi-strategi yang bersifat saling melengkapi dalam situasi baru kekuasaan Jepang.<sup>73</sup>

Langkah yang dilakukan Hatta telah berusaha mengurangi kekerasan terhadap Jepang dan memanipulasi kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bangsa Indonesia, sedangkan langkah Sjahrir ialah ia akan tetap menjauhkan diri dan membentuk suatu kekuatan jaringan bawah tanah, yang didukung terutama oleh para mantan anggota PNI Baru, dan ia akan berusaha menjalin hubungan dengan pihak Sekutu.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional ; Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan* (Jilid II) (Yogyakarta : LKiS, 2008) 25.

<sup>73</sup> M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004* (Jakarta. Serambi Ilmu Semesta, 2001) 412.

<sup>74</sup> *Ibid.*

Sjahrir dalam kegiatannya, ia telah membangkitkan kesadaran mengenai suatu gerakan yang lebih luas, diharapkan peranan pemuda dan para pengikutnya dapat ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir aktif dalam kegiatan, mengikuti perkembangan internasional melalui siaran-siaran radio luar negeri, sehingga Sjahrir dapat memantau perkembangan dunia internasional.<sup>75</sup>

Di sisi lain, Sjahrir berupaya untuk merekrut generasi baru, melalui kontak-kontaknya dengan anggota-anggota Pendidikan Nasional Indonesia seperti Sastra, Sudarsono dan lain-lain serta komunikasinya yang teratur dengan Djohan Sjahroezah, hendaknya tidak dikesampingkan sebagai hal yang remeh.<sup>76</sup>

Para mahasiswa yang mengikuti Sjahrir sadar bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah pergerakan ini, mereka dipersiapkan untuk kegiatan politik jangka panjang dan mereka sedang berada di organisasi yang lebih luas dalam melancarkan perlawanan aktif terhadap Jepang. Sampai pada tingkatan tertentu mereka ikut dalam pergerakan itu.<sup>77</sup>

Anggota-anggota kelompok Sjahrir yang sudah dipercaya didorong untuk membentuk kelompok-kelompok diskusi sendiri. Di Jakarta ada Andi Zaenal Abidin yang membentuk kelompoknya sendiri dan sesudah itu ia berupaya untuk membentuk kelompok-kelompok pemuda di Makasar. Hal serupa juga

---

<sup>75</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir : Negarawan Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului Zamannya* (Jakarta : Kompas 2011) 31.

<sup>76</sup> J.D Legge, *Kaum Intelektual* 114.

<sup>77</sup> *Ibid.*

dijalankan oleh Hamid Algadri di Surabaya dan Listio serta Murdianto di kota yang sama, berikhtiar mengorganisir pelajar-pelajar sekolah menengah atas. Semua aktivitas itu dilakukan secara teratur dan terencana untuk mempersiapkan perjuangan politik jangka panjang.<sup>78</sup>

Sementara itu langkah lain yang dijalankan Sjahrir ialah menyusun kekuatan rakyat dengan membentuk organisasi secara illegal. Hal ini sekaligus dipakai sebagai sarana untuk mendidik para pemuda mencapai Indonesia merdeka. Sjahrir menerapkan sistem desentralisasi, yaitu dengan jalan memberi tanggung jawab dan otonomi kepada rekan-rekan pemimpin di daerah-daerah, karena mereka dirasa lebih menguasai situasi dan kondisi masyarakat dan perjuangan setempat. Tanggung jawab di daerah diberikan antara lain kepada Djohan Sjahruzah di Jawa Timur, Wijono di Jawa Tengah, Hamdani di Jawa Barat, sedangkan Sjahrir bersama Kunaeni, Maruto Nitimiharjo dan Samjono bertanggungjawab atas wilayah Jakarta.<sup>79</sup>

Perjuangan gerakan bawah tanah yang sifatnya non-kooperasi dalam perkembangan selanjutnya merupakan suatu kekuatan pendukung lahirnya proklamasi kemerdekaan. Dalam memasuki saat-saat kemerdekaan Indonesia, Sjahrir berusaha menghimpun kekuatan sambil menjalin kerja sama dengan para nasionalis lain yang berjuang secara kooperasi. Sebagai perwakilan kelompok pemuda, Sjahrir tidak segan untuk mendesak Sukarno – Hatta

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Thalib Ibrahim, *Karya dan Tjita2 Sutan Sjahrir* (Djakarta; Photin, 1966) 11.

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya setelah Jepang mengalami kekalahan dari sekutu, secara psikologi saat itulah saat yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, karena di samping Jepang sudah tidak berbahaya, Indonesia mampu menunjukkan kepada dunia luar bahwa proklamasi kemerdekaan direbut dari tangan Jepang dan bukan semata-mata pemberian pemerintah Jepang.

#### **E. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia**

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehari sesudah Hiroshima diserang bom atom oleh AS. Menggantikan Badan Penyelidik untuk Persiapan Kemerdekaan (PPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan ini dibentuk bukan saja untuk Pulau Jawa, melainkan untuk seluruh Indonesia, sehingga hasil pekerjaannya berlaku untuk seluruh Indonesia.<sup>80</sup>

Sementara itu, pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Sukarno, Moh. Hatta, Dr. Radjiman secara rahasia pergi ke Saigon untuk menemui Jendral Terauchi. Dalam pertemuannya di Daleth, Terauchi menyampaikan kepada ketiga orang pemimpin tersebut bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia : dari kebangkitan hingga kemerdekaan* (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995) 95.

<sup>81</sup> A.J. Sumarmo, *Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia* (Semarang : IKIP Semarang Press, 1991) 74.

Sekembalinya di tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945 ketiga pemimpin pergerakan tersebut membawa “tiga cap” yaitu:

1. Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Moh. Hatta sebagai wakil ketua.
2. PPKI diperbolehkan untuk memulai pekerjaannya pada tanggal 19 Agustus 1945.
3. Lekas cepat-tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia.<sup>82</sup>

Ini merupakan bukti bahwa sebenarnya kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat sepenuhnya bukan hadiah dari Jepang.

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi suatu peristiwa penting yang mempengaruhi dinamika politik kaum pergerakan di Indonesia. Yakni didaptnya kabar bahwa Jepang kalah dan menyerah pada sekutu. Hal itulah yang membuat Sjahrir merasa gelisah dan menginginkan secepatnya proklamasi dilaksanakan.<sup>83</sup>

Dari kelompok muda yang diwakili Sjahrir meminta Bung Hatta sebagai kelompok tua segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia, tanpa harus menunggu persetujuan pemerintahan Jepang karena Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu.<sup>84</sup> Namun Bung Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sjahrir. Agar tidak mengecewakan, maka diajaknya ke rumah

---

<sup>82</sup> A.J. Sumarmo 1991. *Pendudukan Jepang*, 7.

<sup>83</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1996) 461.

<sup>84</sup> Syahbuddin Mangandaralam, *Apa dan Siapa Sutan Sjahrir* (Jakarta: Rosda Jaya Putra, 1987) 38.

Soekarno. Oleh Hatta dijelaskan maksud kedatangan Sjahrir, namun Bung Karno belum dapat menerima maksud Sjahrir dengan alasan bahwa Bung Karno hanya bersedia melaksanakan proklamasi, jika telah diadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI lainnya. Dengan demikian tidak menyimpang dari rencana sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintah Jepang. Selain itu Soekarno akan mengecek terlebih dahulu kebenaran berita kekalahan Jepang tersebut.<sup>85</sup>

Karena merasa tidak puas dengan golongan tua, Sjahrir kemudian pergi ke golongan muda, mereka merupakan para mahasiswa yang bertempat tinggal di kawasan Menteng 31 dan akhirnya disebut dengan pemuda Menteng 31. Disana bertemu dengan Sukarni, B.M. Diah, Sayuti Malik dan lain-lainnya. Sekaligus menyampaikan apa yang ia bicarakan dengan Soekarno-Hatta. Setelah mendengar dari penuturan Sjahrir kepada golongan muda membuat kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada orang lain dan kerajaan lain. Kemudian mereka mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamkan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan anggota PPKI.<sup>86</sup>

Pemuda memiliki alasan untuk menolak kemerdekaan merupakan hadiah dari Jepang, sehingga harus diputuskan tanpa menunggu perintah dari Tokyo.

---

<sup>85</sup> Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan*, 91.

<sup>86</sup> J.D Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan : Peranan Kelompok Sjahrir*, (Jakarta : Grafiti 1993) 173.

Jelas pendirian itu bertentangan dengan para pemuka yang bergabung di dalam PPKI. Kaum muda yang berwatak revolusioner, tidak bisa menunggu dan menahan keinginannya untuk secepatnya merdeka. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengasdengklok, yakni penculikan terhadap Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00 oleh para pemuda, keputusan tersebut diambil dalam rangka untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh dari segala siasat Jepang.<sup>87</sup>

Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari intervensi Jepang, juga agar keduanya mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala kaitan dengan Jepang. Pada dasarnya Soekarno dan Hatta tidak mau ditekan oleh anak-anak muda tersebut, sehingga mereka tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan.<sup>88</sup>

Selain pertimbangan dari tekanan tersebut, Hatta juga menekankan bahwa saat itu Jepang secara defacto masih sangat kuat, tetap berkuasa penuh dan masih lengkap dengan persenjataannya sehingga mudah untuk menumpas segala jenis kemerdekaan yang diinginkan golongan muda.<sup>89</sup>

Perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda akhirnya dapat diselesaikan dengan bantuan Ahmad Soebardjo, seorang tokoh pemuda yang bekerja di angkatan laut Jepang. Akhirnya Soekarno-Hatta dijemput oleh pemuda

---

<sup>87</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir Politik dan Pengasingan*, 472.

<sup>88</sup> Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan*, 13.

<sup>89</sup> A.J. Sumarmo 1991. *Pendudukan Jepang*, 76.

Yusuf Kunto bersama Ahmad Soebardjo dan Soediro untuk bersama-sama kembali ke Jakarta guna membicarakan proklamasi melalui sidang PPKI yang anggotanya telah ditambah dengan wakil-wakil dari pemuda.<sup>90</sup>

Pada pukul 23.00 rombongan tiba di Jakarta tepatnya di rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Di tempat itulah para pemuda Indonesia beserta golongan tua berkumpul menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.<sup>91</sup> Melalui pemikiran dan perdebatan yang panjang seputar perumusan teks proklamasi dan siapa yang akan bertanda tangan di akhir teks proklamasi, pada akhirnya teks proklamasi pun dapat dihasilkan. Pada pagi harinya naskah proklamasi tersebut dibacakan oleh Sukarno.<sup>92</sup>

Peristiwa besar tersebut hanya berlangsung sekitar satu jam. Namun demikian pengaruhnya besar sekali, sebab peristiwa tersebut telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berabad-abad lamanya dan dengan didorong oleh amanat penderitaan rakyat telah mencapai titik kulminasinya pada proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan salah satu sarana yang merealisasikan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur, serta untuk ikut membentuk dunia baru yang

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan*, 13.

<sup>92</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 476

damai dan abadi, bebas dari segala penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa lain.<sup>93</sup>

#### **F. Kebijakan Politik Sjahrir**

Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia maka terjadi berbagai perubahan-perubahan politik nasional, terlebih dalam sistem ketatanegaraan. Lahirnya kemerdekaan Indonesia diikuti dengan pembentukan kabinet presidensial tidak mampu bertahan lama, karena pada bulan November 1945 kabinet tersebut telah tumbang dan muncul kabinet baru yang bercorak parlementer. Hal ini ditandai dengan munculnya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 dimana pemerintah memperkenankan rakyat Indonesia mendirikan partai-partai baru. Sementara itu Sjahrir yang semula duduk sebagai ketua badan pekerja KNIP telah berhasil menempatkan dirinya sebagai perdana menteri pada tanggal 4 November 1945.<sup>94</sup>

Tampilnya Sjahrir sebagai perdana menteri menjadikan dirinya tidak hanya sebagai politikus tetapi juga sebagai negarawan. Dalam kedudukannya tersebut jelas bahwa pemikiran atau visi Sjahrir mempengaruhi situasi politik waktu itu. Sehingga dalam meneruskan perjuangan bangsa Indonesia maka ia telah menentukan berbagai kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam sebuah

---

<sup>93</sup> Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan*, 15.

<sup>94</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20* (Jakarta: Kanisius, 1988) 144.

pamphlet berjudul Perjuangan Kita yang ditulis oleh Sjahrir tanggal 10 November 1945.<sup>95</sup> Isi pokok dari pamphlet itu ialah:

- 1) Revolusi Indonesia adalah revolusi demorkasi, baru setelah itu revolusinasional
- 2) Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan negara waktu itu, baik karena faktor-faktor intern maupun ekstern RI harus memelihara hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berpenaruh di daerah ini (Asia) yaitu Inggris dan Amerika. Artinya kita harus menjaga jangan sampai kedua kekuatan tersebut membantu Belanda.

Untuk keperluan itu maka diperlukan upaya untuk menarik simpati mereka. Kita tidak boleh melakukan revolusi yang meluap-luap sehingga menjadi terorisme yang tidak bertanggungjawab terhadap orang asing maupun golongan minoritas yang memihak Belanda, seperti orang-orang Cina, Indo-Belanda, Manado, Ambon, dan sebagainya, demikian ia tegaskan. Menurut Sjahrir bahwa nasib bangsa Indonesia sangat tergantung pada kebijaksanaan politik yang diambil oleh kekuatan-kekuatan imperialis waktu itu. Sehingga satu-satunya jalan untuk menjamin kemerdekaan Indonesia adalah dengan melalui diplomasi yang lihai dan fleksibel. Agar Amerika dan Inggris tidak terpanggil untuk mendukung Belanda secara penuh.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Syahbuddin Mangandaralam, *Apa dan Siapa*, 43.

<sup>96</sup> W.H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi* (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan dan Ekonomi Sosial, 1982) 351.

Akan tetapi kebijakan perjuangan Sjahrir mendapat tantangan dari golongan oposisi yakni golongan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Sehingga terjadi perbedaan pendapat atau visi dalam menentukan arah perjuangan bangsa. Menurut Tan Malaka, ia menginginkan revolusi total atau menyeluruh. Artinya kemerdekaan yang dicapai bukan sekedar politik tetapi juga ekonomi, sosial dan mental. Sebagai wujud dari oposisinya, maka ia menyampaikan visinya kepada pemerintahan Sjahrir. Isi visi tersebut ialah:

1. Berunding atas dasar pengakuan kemerdekaan 100 persen
2. Pemerintah rakyat (dalam arti kemauan rakyat)
3. Tentara rakyat (mengandung arti kemauan tentara sesuai dengan kemauan
4. Menyelenggarakan tawanan Eropa
5. Melucuti senjata Jepang
6. Menyita hak dan semua milik musuh
7. Menyita perusahaan (pabrik, bengkel) dan pertanian (perkebunan) serta pertambangan milik musuh.<sup>97</sup>

Disamping menyampaikan visinya dengan tujuh pasal tersebut diatas, Tan Malaka juga mengeluarkan brosur bernama "*Muslihat*" pada tanggal 2 Desember 1945 sebagai tandingan terhadap pamflet "*Perjuangan Kita*" yang dibuat oleh Sjahrir.<sup>98</sup> Dalam brosurnya Tan Malaka membuat neraca kekuatan Indonesia dibanding dengan sekutu, yakni Belanda. Serta mengajak seluruh

---

<sup>97</sup> Abu Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi* (Jakarta: UI Press, 1995) 176.

<sup>98</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan*, 548.

lapisan masyarakat untuk mengadakan perlawanan serentak dan mengobarkan revolusi total.<sup>99</sup>

Ide yang dilontarkan Tan Malaka mendapat tanggapan yang sangat luas di kalangan pemuda dan golongan-golongan yang tidak setuju terhadap kebijaksanaan Sjahrir. Mereka semua telah bergabung untuk mengikuti visi Tan Malaka. Pertentangan politik yang bermula dari perdebatan visi antara Sjahrir dan Tan Malaka tidak dapat dihindarkan lagi. Kekuatan yang dahsyat berhadapan dengan kebijakan kabinet Sjahrir.<sup>100</sup>

Kebijakan politik diplomasi Sjahrir dianggap sangat lamban dan tidak menguntungkan revolusi. Akibatnya pemuda, laskar perjuangan, masyarakat dan bahkan tentara memihak visi revolusi Tan Malaka. Pemerintah yang mengutamakan jalan diplomasi berhadapan dengan semangat meledak-ledak massa rakyat yang ingin berjuang meningkatkan revolusi bersenjata atau konfrontasi. Semangat yang meluap-luap tersebut mendapatkan saluran lewat pandangan-pandangan revolusioner Tan Malaka yang kemudian melahirkan persatuan perjuangan pada awal tahun 1946.<sup>101</sup> Persatuan perjuangan telah berhasil mewadahi 141 organisasi politik, laskar perjuangan, partai politik dan lain-lain. Bahwa persatuan perjuangan pada waktu itu mewakili sebagian besar kekuatan sosial politik termasuk militer. Lahirnya persatuan perjuangan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Taufik Abdullah, *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta : LP3ES 1994) 164.

<sup>101</sup> J.D Legge, *Kaum Intelektual*, 198.

merupakan pernyataan tidak puas dari sebagian besar masyarakat terhadap garis kebijaksanaan politik pemerintah Sjahrir, yang dianggap terlalu lunak karena mengutamakan diplomasi.<sup>102</sup>

Pada akhir Januari 1946 persatuan perjuangan lebih merupakan badan perwakilan rakyat daripada KNIP. Hal itu disebabkan karena kedudukan Tan Malaka yang memegang pimpinan persatuan perjuangan. Sehingga dengan kondisi yang demikian popularitas persatuan perjuangan semakin meningkat apalagi di kalangan pemuda laskar perjuangan. Memang Tan Malaka menilai pemuda sangat tinggi karena mereka adalah ujung tombak revolusi.<sup>103</sup>

Sementara itu persatuan perjuangan yang semakin populer pamornya, dan sebaliknya di pihak pemerintahan Sjahrir yang kondisinya bertambah buruk yang ditandai dengan berbagai peristiwa yakni dikuasanya Kota Surabaya dan Kota Bandung pada akhir November oleh Sekutu, tanggal 8 November 1945 Kota Bogor direbut, disusul Kota Bekasi pada 13 Desember 1945. Akibatnya presiden dan wakil presiden hijrah ke Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946. Tetapi dengan kedudukan Sjahrir sebagai perdana menteri, menlu sekaligus mendagri membuat ia harus berada di Jakarta.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Taufik Abdullah, *Manusia Dalam Kemelut*, 165.

<sup>103</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20*, 151.

<sup>104</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad 20*, 153.

Dengan kondisi negara yang semakin sulit, Sjahrir memutuskan untuk minta berhenti (23 Februari 1946) dari jabatan perdana menteri. Pada tanggal 28 Februari 1946 keputusan tersebut disetujui oleh presiden.<sup>105</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya ketika KNIP bersidang pada tanggal 2 Maret 1946, Hatta mengumumkan penunjukan kembali Sjahrir sebagai formatur dan diterangkan bahwa kabinet baru akan mempunyai program 5 pasal.<sup>106</sup>

1. Berunding atas dasar pengakuan RI merdeka 100%.
2. Mempersiapkan rakyat, negara di segala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan RI
3. Menyusun pemerintah pusat dan daerah yang demokrasi
4. Penyempurnaan pembagian makanan dan pakaian
5. Menjalankan UUD 1945 pasal 33 sesuai ketentuan

Meski kabinet tersebut belum merupakan kabinet koalisi nasional, tetapi presiden menerima dengan kepercayaan terhadap perdana menteri. Pada tanggal 12 Maret 1946 kabinet Sjahrir II dilantik. Sjahrir menjabat perdana menteri dan menlu, Amir Syarifudin menjadi menteri pertahanan.<sup>107</sup>

Dengan diberikannya kepercayaan menjadi perdana menteri yang kedua kalinya, menjadikan Sjahrir tetap berkuasa dan dapat melanjutkan diplomasinya

---

<sup>105</sup> O.E. Engelen, *Lahirnya Satu Bangsa*, 247

<sup>106</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 1995), 60.

<sup>107</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20*, 161.

kembali. Namun kejadian itu membuktikan bahwa kekuatan politik Sjahrir sudah merosot. Sebaliknya Soekarno – Hatta berhasil kembali memainkan peranan penting bahkan mungkin menentukan dan muncul sebagai pemenang yang sebenarnya.

Dengan kejadian itu diplomasi dapat dilanjutkan, Sjahrir menandatangani persetujuan dengan Sekutu yang isinya tentang kesanggupan pemerintah RI menjamin keselamatan dan pengangkutan intenan ke pelabuhan. Hal ini suatu sukses pertama Sjahrir karena sebagai imbalannya gerak maju Sekutu ke Jateng dan Jatim dihentikan.<sup>108</sup>

Namun suatu rintangan berat yang dihadapi oleh pemerintah Sjahrir dalam diplomasinya yakni Belanda berhasil merebut daerah Indonesia bagian timur serta menduduki daerah lain di luar Jawa. Akibatnya Sjahrir mundur dari tuntutanya terdahulu yakni minta pengakuan Belanda secara *de facto* kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Hal ini sebagai imbalan kesediaan RI membentuk serikat dan uni Indonesia – Belanda. Hal itu terpaksa dilakukan setelah menyaksikan Belanda berhasil menciptakan cara federal di Malino (Sulawesi Selatan) pada bulan Juli 1946.<sup>109</sup>

Sjahrir sadar sepenuhnya bahwa langkah yang diambilnya mengandung resiko sangat besar. Kesediaannya mundur selangkah, tidak merdeka 100 %

---

<sup>108</sup> *Ibid*, 165

<sup>109</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004* (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001) 336.

berarti sudah menyimpang dari program 5 pasal Sukarno, apalagi dengan 7 pasal program minimum persatuan perjuangan. Oleh karena itu Sjahrir bertekad untuk mematahkan kekuatan oposisi secara keras. Pemerintah (Sjahrir) kemudian melakukan penangkapan penahanan terhadap tokoh-tokoh persatuan perjuangan seperti Tan Malaka, Abi Kusno, Sukarni, Gatot Tarunamiharja, dan Sayuti Melik pada tanggal 22 Maret 1946. Penahanan dilakukan pemerintah dengan alasan demi menghindarkan timbulnya kegelisahan dan kekacauan dalam masyarakat maupun perpecahan yang dapat menghalangi politik pertahanan pemerintah.<sup>110</sup>

Setelah peristiwa penangkapan itu, memperlancar perundingan dengan pihak Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin Suwandi dikirim ke Nederland berangkat bersama Van Mook dan Sir Archibald Clark Kerr (diplomata Inggris yang menjadi perantara perundingan), pada tanggal 4 April 1946. Dari pihak Belanda delegasi dipimpin oleh PM Schermerhorn. Namun perundingan mengalami jalan buntu karena Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan de facto RI atas Jawa dan Madura saja, tidak termasuk Sumatera.

Sementara PM Sjahrir dan kabinetnya menghadapi kesulitan dalam diplomasi. Keadaan dalam negeri sangat sulit, hal itu ditandai dengan berbagai kejadian yakni pada tanggal 24 Maret 1946 seluruh Bandung telah jatuh ke tangan Sekutu, dan pada tanggal 17 April 1946 Bandung kemudian diserahkan kepada Belanda oleh Sekutu. Selanjutnya sejak bulan itu daerah-daerah

---

<sup>110</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20*, 164.

pendudukan Inggris diserahkan penguasaannya kepada Belanda. Keadaan yang sangat tidak menguntungkan ini mendorong blok persatuan perjuangan mendesak agar kabinet Sjahrir diperbarui sehingga mampu mempersiapkan diri menghadapi Belanda yang semakin santer akan membuka serangan atas Republik Indonesia.

Sementara itu dalam situasi yang eksplosif semacam itu terjadi penculikan atas diri PM Sjahrir, Dr. Sudarsono, Mayjen Sudibyo dan Sumotri Joyohdikusumo tanggal 27 Juni 1946. Penculikan dilakukan oleh Mayor A.K. Yusuf dan kawan-kawannya. Mereka diculik dari penginapannya di Sala, kemudian disembunyikan di Desa Paras kurang lebih 10km sebelah barat Boyolali. Sjahrir sebagai perdana menteri dinilai telah mengkhianati revolusi melalui perundingan-perundingan dengan Belanda yang sangat merugikan pihak Indonesia.<sup>111</sup>

Peristiwa penculikan PM Sjahrir dan rekan-rekannya mendorong presiden Sukarno mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Hal itu dilakukan karena demi menjaga stabilitas negara dan bangsa. Jika keadaan sudah stabil kembali Sukarno akan mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada kabinet. Tindakan selanjutnya ialah pada tanggal 30 Juni 1946 presiden mengucapkan pidato radio yang isinya: (1) menyatakan negara dalam keadaan darurat, (2) presiden segera akan memimpin sidang kabinet darurat, (3) melakukan berbagai usaha pencairan

---

<sup>111</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad 20*, 172.

PM Sjahrir dan rekan-rekannya yang tengah diculik, (4) mengirim kawat ke Jakarta yang berisi permintaan penghentian tembak menembak secara umum dan supaya Belanda tidak menggunakan situasi kritis itu untuk melakukan serangan terhadap RI, (5) menyerukan kepada seluruh rakyat bahwa demi nama baik Indonesia mereka yang menculik Sjahrir segera untuk melepaskannya kembali.<sup>112</sup>

Pidato presiden yang mencela penculikan itu, terbukti memberikan hasil yang mengembirakan. Ternyata kemudian PM Sjahrir dan rekan-rekannya dilepaskan oleh para penculiknya. Setibanya di Sala mereka terus diterbangkan ke Jakarta untuk memangku kekuasaan kembali serta melanjutkan kebijaksanaan jalannya kembali untuk dilanjutkan.<sup>113</sup>

Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan politik diplomasi Sjahrir maka diadakanlah perundingan dengan pihak Belanda. Perundingan itu dihadiri oleh pihak Indonesia yang dipimpin PM Sjahrir dan di pihak Belanda dipimpin oleh Shcermerhn. Sebagai penengah pihak Inggris yang dipimpin oleh Lord Killearn. Dalam perundingan tersebut menghasilkan persetujuan Linggarjati (15 November 1946).<sup>114</sup>

Persetujuan linggarjati memuat 17 Pasal ketentuan, tetapi isi pokoknya ialah sebagai berikut.

---

<sup>112</sup> *Ibid*, 173.

<sup>113</sup> O.E. Engelen, *Lahirnya Satu Bangsa*, 256

<sup>114</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir, Negrawan Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului zamannya* (Jakarta : Kompas, 2011) 63.

1. Pengakuan kedaulatan secara de facto pemerintah RI atas Jawa, Sumatra, Madura dan wilayah yang diduduki Sekutu/Belanda secara berangsur dan dengan kerjasama kedua pihak akan dimasukkan ke dalam daerah RI.
2. Pemerintah Belanda dan RI akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat.
3. Pemerintah Belanda dan RI akan bekerja sama membentuk Uni IndonesiaBelanda.
4. Pemerintah Belanda dan RI akan mengusahakan bahwa pembentukan NIS dan UNI dapat diselesaikan sebelum 1 Januari 1949.
5. Pemerintah RI mengakui, memulihkan dan melindungi hak milik orang asing.
6. Pemerintah Belanda dan RI setuju mengadakan kerja sama dalam militer.
7. Jika terjadi perselisihan, maka masalah diserahkan pada komisi arbitrase untuk pemecahannya.<sup>115</sup>

Linggarjati adalah sebuah daerah yang berada di sekitar Cirebon sebelah selatan atau di kaki Gunung Ceremai dekat kota Kabupaten Kuningan. Seperti yang dikatakan Sjahrir “kedamaian dan kesejukan hawa Linggarjati sangat membantu kedua belah pihak untuk mencapai persetujuan”.<sup>116</sup>

Perundingan Linggarjati telah dilaksanakan, sungguhpun persetujuan Linggarjati sudah tercapai tetapi belum bisa dilaksanakan, karena hasil

---

<sup>115</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad 20*, 182.

<sup>116</sup> K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*. (Jakarta : Gunung Agung, 1986) 7.

persetujuan ini harus diratifikasi oleh parlemen masing-masing. Baik parlemen Belanda maupun parlemen Indonesia (KNIP) tidak begitu saja mau menerima persetujuan yang telah dicapai oleh pemerintah negara masing-masing.<sup>117</sup>

Sejak awal, bahwa persetujuan Linggarjati ini sebagai langkah pertama ke arah tercapainya kemerdekaan dan kedaulatan penuh untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya persetujuan ini juga diharapkan Indonesia mendapat waktu untuk menyusun seluruh kekuatan, terutama kekuatan angkatan bersenjata, guna menghadapi segala kemungkinan, terutama kemungkinan serangan dari Belanda.<sup>118</sup>

Ucapan semua pemimpin Republik pada waktu itu menegaskan sifat sementara perjuangan itu. Yang penting ialah sudah mendapatkan pengakuan *de facto*, sehingga dapat membangun perwakilan-perwakilan di luar negeri dan menempatkan kehadiran Indonesia dalam masyarakat internasional, serta dapat membela kepentingan Indonesia dan mengemukakan pendapat serta pandangan bangsa Indonesia. Sedangkan di dalam negeri tentara Republik Indonesia diakui sebagai tentara suatu negara, dan bukan sebagai suatu kekuatan bersenjata tanpa status.<sup>119</sup>

Dengan adanya persetujuan Linggarjati, Belanda sudah menerima politik dekolonisasi yang dikehendaki Belanda ialah dekolonisasi dengan kepentingan-kepentingan Belanda tetap terjamin dalam negara Indonesia dimasa depan. Ini

---

<sup>117</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad 20*, 182

<sup>118</sup> *Ibid*, 163

<sup>119</sup> O.E. Engelen, *Lahirnya Satu Bangsa*, 262.

berarti bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang akan diserahkan kepada Indonesia harus mempunyai pembatasan-pembatasan guna menjamin kepentingan mereka. Dalam rangka inilah perlu dilihat sikap dan tindakannya menghadapi Republik sesudah naskah Linggarjati diparaf dan kemudian sesudah persetujuan itu ditanda tangani. Pembatasan-pembatasan itu berupa menghapus kekuatan militer Republik, meniadakan kegiatan diplomatik Republik di luar negeri, membentuk negara Indonesia Serikat sedangkan Republik hanya merupakan satu negara bagian, dan pembentukan Uni Belanda-Indonesia, yang dipimpin oleh Mahkota Belanda, sehingga Belanda dapat turut menentukan kebijakan politik Indonesia.<sup>120</sup>

Di pihak Belanda, persetujuan itu juga dianggap langkah pertama untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri, yaitu untuk melikuidasi Republik yang dilahirkan secara revolusioner. Untuk maksud ini mereka telah menyusun bermacam-macam rencana dan persyaratan, yang “ditambahkan” kepada naskah persetujuan yang telah diparaf itu, yang menggerogoti hasil yang telah dicapai. Sebelum persetujuan ditandatangani, Belanda sudah menginginkan tambahan-tambahan yang semunaya ditolak.

Tambahan yang diinginkan oleh Belanda ialah:

- a. Republik harus menerima seorang wakil Tinggi Mahkota yang mengepalai Negara Indonesia Serikat
- b. Republik harus menerima kerjasama ekonomi dan militer dengan Belanda

---

<sup>120</sup> Abu Bakar Loebis, *Kilas Balik*, 213.

- c. Republik harus menerima pembentukan gendarmerie (polisi) bersama, dan memasukkan TRI ke dalamnya, untuk menjaga keamanan di wilayah Jawa, Madura dan Sumatera
- d. Republik harus menghentikan semua kegiatan dan hubungan luar negerinya.<sup>121</sup>

Semua keinginan Belanda sejak mula ditolak. Hingga menjelang penyerangan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. seandainya tambahan-tambahan tersebut diterima, maka pada dasarnya Republik Indonesia menerima penghapusan identitasnya sebagai suatu negara merdeka, dengan perkataan lain Republik telah dilikuidasi.

Disamping usaha untuk menambah hal-hal yang baru pada naskah persetujuan itu, Belanda melancarkan serangan-serangan militer terhadap pelbagai daerah di Republik Indonesia seperti di Bogor, Sidoarjo dan Irian. Semuanya ini merupakan provokasi yang memancing penolakan naskah persetujuan itu oleh Republik.

Belanda dipengaruhi oleh tiga faktor dalam sikap dan tindakannya:

- a. Sikap Republik yang tidak pernah melepaskan pendiriannya bahwa Republik meliputi seluruh wilayah Indonesia, dan tidak bersedia melepaskan identitasnya sebagai negara dengan menerima tuntutan-tuntutan Belanda
- b. Meningkatnya kekuatan militer yang dianggap cukup kuat untuk menghancurkan Republik, baik melalui blokade, di laut dan penyerangan

---

<sup>121</sup> Abu Bakar Loebis, *Kilas Balik*, 214.

militer di darat (jumlah pasukannya pada permulaan tahun 1947 sudah lebih dari 120.000 orang, baik tentara kerajaan Belanda maupun KNIL)

- c. Keadaan keuangan negara Belanda yang sangat parah. Untuk membangun dua divisi tentara saja Belanda harus meminjam 120 juta pounsterling dari pemerintah Inggris, yang harus dibayar kembali pada bulan Maret 1947, sedangkan kalau persediaan emasnya dijual, paling banyak hanya bisa menutupi semua pembayaran di Indonesia sampai akhir tahun 1947.<sup>122</sup>

Jadi, jelas bagi mereka, masalah Indonesia harus diselesaikan secepat-cepatnya kalau mereka tidak mau menghadapi kebangkrutan. Oleh karena itu Republik harus ditekan terus supaya menerima usul-usulnya dan kalau tidak mau, maka Republik harus dihancurkan.

Parlemen Belanda baru akan memberikan persetujuannya setelah berhasil diyakinkan bahwa hasil persetujuan Linggarjati masih bersifat sementara, jadi masih akan diadakan pengaturan lebih lanjut yang menyangkut hubungan Indonesia dan Belanda. Keputusan ini merupakan hasil maksimal yang dicapai masa itu. Ini disebabkan golongan konservatif yang takut kehilangan Indonesia dan golongan tersebut sangat kuat suaranya di parlemen Belanda.<sup>123</sup>

Sementara itu di Indonesia pun “Linggarjati” mendapat tentangan yang kuat dari berbagai kelompok masyarakat, sehingga di parlemen melalui KNIP juga tidak bersedia memberikan pengesahannya terhadap hasil persetujuan

---

<sup>122</sup> Abu Bakar Loebis, *Kilas Balik*, 215.

<sup>123</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Renvile* (Jakarta : Sinar Harapan, 1983) 135.

Linggarjati. KNIP menganggap bahwa persetujuan Linggarjati terlalu menguntungkan Belanda, disamping itu juga tidak sesuai dengan perjuangan bangsa Indonesia yang menghendaki kemerdekaan seratus persen. Jadi mengenal hasil keputusan perundingan Linggarjati terjadi pro dan kontra dalam parlemen. Dan mengenai masalah ini Sutan Sjahrir menyatakan harapannya agar naskah persetujuan Linggarjati dapat diterima.<sup>124</sup>

Beberapa partai politik yang berada dalam parlemen yang menentang persetujuan Linggarjati diantaranya Masyumi, PNI, ACOMA, Partai Wanita, PARI, dan Partai Rakyat Jelata. Dan yang mendukungnya ialah PKI, BTI, Pesindo, Partai Buruh, Parkindo, dan Partai Katholik.<sup>125</sup>

Dengan pertentangan tersebut, sehingga mengharuskan Presiden Sukarno ikut turun tangan, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 tanggal 29 Desember 1946. yang isinya mengenai penambahan keanggotaan dalam KNIP. Dengan demikian akan memunculkan kekuatan yang pro perjanjian Linggarjati semakin besar, sehingga sah untuk diadakan ratifikasi. Ketika partai-partai menentang perjanjian Linggarjati memprotes peraturan tersebut, Wakil Presiden Moh. Hatta berbicara di depan sidang umum KNIP dan menyatakan bahwa kalau peraturan presiden tentang penambahan keanggotaan KNIP ditolak, maka presiden dan wakil presiden mempersilakan KNIP untuk memilih presiden

---

<sup>124</sup> A.B. Lopian dan P.J. Dronglover, *Menelusuri Jalur Linggarjati* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1992) 4.

<sup>125</sup> Nugroho Notokusanto dan Marwati, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993) 133.

dan wakil presiden yang baru. Karena ancaman tersebut maka partai-partai yang menentang Linggarjati terpaksa mengalah, mereka tidak mampu menemukan pemimpin yang lebih baik untuk menduduki jabatan presiden dan wakil presiden selain Sukarno dan Hatta, yang pada masa revolusi merupakan dwitunggal yang berwibawa.<sup>126</sup>

Akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 naskah persetujuan Linggarjati ditandatangani oleh kedua delegasi Indonesia dan Belanda. Pengesahan ini disaksikan oleh peninjau-peninjau Amerika, Inggris dan Vatikan di Istana Negara Riswijk.<sup>127</sup>

Secara garis besar, walaupun perjanjian ini tidak memuaskan kedua belah pihak baik Indonesia dan Belanda, namun hasil keputusan Linggarjati ini sedikit banyak telah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia ketika pertama kali berkeinginan menjalankan strategi perjuangan politik diplomasi adalah:

- a. Berusaha agar RI diakui sebanyak mungkin oleh negara di dunia, sehingga perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi dianggap dengan “Gerakan Nasional” dalam suatu negara jajahan, tetapi sebagai negara yang berdaulat penuh.
- b. Mempertahankan kekuatan fisik yang telah dibangun.<sup>128</sup>

### **G. Akhir Perjuangan Sjahrir**

Dengan dimulai disahkannya persetujuan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947, merupakan bukti keberhasilan Sjahrir sebagai perdana menteri

---

<sup>126</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggarjati*, 222.

<sup>127</sup> *Ibid*, 233.

<sup>128</sup> A.B. Lopian dan P.J. Dronglover, *Menelusuri Jalur*, 16.

Indonesia yang memimpin perjuangan melalui meja perundingan dengan bangsa Belanda.

Keberhasilan dari kebijakan politiknya, disisi lain menjadikan bumerang baginya. Hal itu disebabkan karena dalam persetujuan Linggarjati terdapat ketidakjelasan, sehingga menimbulkan pertentangan antara RI dan Belanda. Dalam bulan April dan Mei timbullah keluhan dari kedua belah pihak yang disertai tuduhan saling menyalahkan. Pihak Belanda mengeluh akan pihak RI yang terus saja menyelenggarakan hubungan dengan luar negeri (India dan negara-negara Timur Tengah). Sedangkan pihak RI juga mengeluh terhadap Belanda yang terus menjalankan aksi separatismenya dan bantuan Belandan kepada Partai Rakyat Pasundan yang memelopori pendirian Negara Pasundan pada 4 Mei 1947 Linggarjati. Serta diperkuatnya tentara Belanda di wilayah Indonesia yang seharusnya ditarik mundur dari RI.<sup>129</sup>

Dalam persetujuan itu, Sjahrir sebagai pelopor dari pelaksanaan perjanjian Linggarjati, diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya itu. Berbagai usulan dari pihak Belanda kepada pihak RI dilaksanakan, sehingga pihak RI harus menjawab usulan balasan tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, Sjahrir beserta kabinetnya mengalami kesukaran berhubungan dengan usulan-usulan yang telah disampaikan dengan

---

<sup>129</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad 20*, 185.

pihak Belanda. Disisi lain berbagai partai mulai dari pihak oposisi, kemudian juga partai-partai pemerintah menentang kebijaksanaannya.<sup>130</sup>

Dengan situasi yang tidak menentu, kedudukan Sjahrir beserta kabinetnya yang terancam lengser dan kondisi pemerintahan negara yang genting dan darurat menjadikan Sjahrir dan kabinetnya mengembailkan mandatnya kepada presiden. Pada tanggal 27 Juli 1947 Sjahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden, sehingga berakhirilah pemerintahan Sjahrir dalam negara Indonesia.

---

<sup>130</sup> *Ibid*, 187.